Volume : 3 No. 01 Tahun 2015

ISSN : 2087-6203

STIE NIAS SELATAN

EQUILIBRIUM

Samalua Waoma, SE., MM	Strategi Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan
Alwinda Manao, SE., MM	Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Perlengkapan Anak-Anak Di Butik M&J Di Pasar Telukdalam
Dalinama Telaumbanua, SH., MH	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Koperasi Dengan Teori Tujuan Hukum
Anskaria Simfrosa Gohae, SE., MM	Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Elistina Wau, SE., MM	Analisis Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Swasta Senora Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan
Paskalis Dakhi, SE., M.AP	Peranan Rayonisasi Dalam Perusahaan Distribusi

Yayasan Pendidikan Nias Selatan

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM

Dalinama Telaumbanua³

ABSTRAK

Peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan begitu cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya. Begitu juga Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri, yang dikaitkan dan dibedah teori tujuan hukum menurut Gustav Rabruch, yang dianalisis dari 3 (tiga) aspek yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengarahkan koperasi kearah yang lebih berperan dalam perekonomian nasional yang benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Pada akhirnya Koperasi diharapkan menjadi organisasi ekonomi yang mapan, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Kata Kunci: *Koperasi, Tujuan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Prinsip yang melekat pada Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional tentu patut diapresiasi. Oleh karena peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan begitu cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada, masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Dalam tulisan ini, penulis membahas Peraturan Perundang-Undangan koperasi dalam hal pembagian keuntungan, Lapangan Usaha koperasi, dan pertanggungjawaban ketika koperasi mengalami kerugian. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut di atas akan dibedah masing-masing dengan teori tujuan menurut Gustav Rabruch.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengarahkan koperasi sehingga lebih berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan

³ Dosen Tetap STIH Nias Selatan

merupakan organisasi ekonomi yang mapan, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Sehingga pada akhirnya Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan koperasi ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas pembagian keuntungan, lapangan usaha koperasi dan pertanggungjawaban ketika koperasi mengalami kerugian.

B. KAJIAN TEORI

Dalam tulisan ini, penulis menganalisis Peraturan Perundang-Undangan koperasi dengan menggunakan teori Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Sri Harini Dwiyatmi, 2010:15). Gustav meletakkan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Sehingga Radbruch memandang 'materi' dan 'bentuk' seperti dua sisi mata dari satu mata uang. 'materi' mengisi 'bentuk', sebaliknya 'bentuk' melindungi 'materi'. Itulah kira-kira frase yang tepat (Bernard L. Tanya, dkk, 2006:129) untuk menggambarkan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan merupakan 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum sebagai 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan. Aspek keadilan menunjuk pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Hukum terkait dengan keadilan, oleh karena keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan ini merupakan proses dinamis yang memakan waktu. Upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum untuk mengaktualisasikannya. Sehingga keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, menyebutnya sebagai realitas *absolute*, sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel, dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Semua politik praktis tampak sebagai rupa buruk dari politik pengetahuan dan visi intelektual. Serta keadilan dapat dianggap sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Sehingga argumen tentang keadilan sangat menentukan wajah perpolitikan. Sebaliknya politik memberikan problema dasar bagi semua filsafat keadilan.

Sumber dari keterkaitan pembahasan doktrin tentang kaitan keadilan yakni kesetaraan, dan perbedaan antara keadilan distributif dan korektif. Perbedaan tersebut tentunya sangat mendasar bagi semua pemikiran tentang problema keadilan dan hukum. Dan karena keadilan distributiflah yang memutuskan siapa dan dengan siapa dia setara. Kita boleh berpandangan bahwa dari sudut pandang filsafat, tidak ada sesuatu yang bisa ditentukan tentang kesetaraan. Oleh karena kesetaraan tidak dapat dibuktikan secara filsafati. Namun apa yang bisa dibuktikan mengenai manusia jika bukti yang dimaksudkan ialah dalam bentuk pembuktian logis yang koheren?. Jika tuntutan akan pembuktian semacam itu dikesampingkan dan probabilitas yang manusiawi dianggap cukup untuk tujuan solusi rasional atas persoalan, maka banyak yang bisa dikatakan dan ditunjukkan mengenai kesetaraan. Salah satunya Kant, yang mengecam keras segala ketidaksetaraan berdasarkan keturunan sebagai ketidakadilan (Friedrich, 2010: 239-248).

Pandangan Radbruch tentang keadilan tidak begitu mendalam. Menurut Radbruch sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan sama (Notohamidjojo, 1975: 44). Sehingga pada intinya, konsep keadilan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan lain sebagainya (Friedrich, 2010: 24).

Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yakni memajukan kebaikan dalam diri manusia. Nilai kebaikan bagi manusia biasanya berhubungan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan kebaikannya) yaitu individu, kolektivitas dan kebudayaan. Jika subjeknya adalah individu, maka hukum yang disusun untuk tujuan yang bersifat individualistis ini, tidak hanya mengagungkan individu dan martabatnya akan tetapi juga memberi perlindungan khusus seperti dalam konstitusi Amerika (Bernard L. Tanya, Yoan & Markus, 2006: 129). Sementara jika subjeknya adalah Negara, maka tujuan hukumnya adalah kemajuan Negara yang menghasilkan sistem hukum kolektif. Sedangkan jika subjek

yang dituju adalah kebudayaan maka sistem hukum yang diciptakan adalah sistem hukum transpersonal. Disini aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian khusus seperti tentang demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup menjadi urusan seluruh umat manusia yang dijamin oleh hukum internasional (Theo Huijbers, 1982:163).

Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch mengakui bahwa selalu terjadi pertentangan antar tiga aspek atau tujuan hukum tersebut.

C. ANALISA / PEMBAHASAN

Dari uraian di Pendahuluan dan kajian terori di atas, maka penulis menganalisis atau membahas beberapa ketentuan yang dianggap relevan menurut teori Gustav Radbruch yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Koperasi, yaitu:

1. *Pengaturan mengenai pembagian keuntungan dari Koperasi yaitu:*

- a) Pengaturan mengenai pembagian keuntungan dapat ditemui dalam Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.25 tahun 1992 tentang Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana:
 - (1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
 - (2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Menurut penulis, dengan ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah di atur secara jelas dan tegas dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 25 tahun 1992 maka aspek kepastian menurut Gustav sudah terpenuhi. Sementara keuntungan yang didapat dari Sisa Hasil Usaha suatu koperasi pasti mempunyai manfaat bagi anggotanya, sehingga aspek kemanfaatan terpenuhi. Sedangkan jika dilihat dari pembagian keuntungan SHU sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota maka itu menandakan aspek keadilan sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan keadilan dalam hal kesamaan proporsional, yang mana memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan lain sebagainya.

- b) Pasal 16 ayat (8) huruf b Permen No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dimana Pendapatan USP Koperasi setelah dikurangi biaya pengelolaan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan salah satunya dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.

Jika dilihat pengaturan pembagian keuntungan dalam Permen Nomor 19 tahun 2008 ini, maka aspek kepastian menurut Gustav sudah terpenuhi. Sementara keuntungan yang diperoleh dapat digunakan oleh anggotanya, sehingga aspek kemanfaatan terpenuhi.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi. Hal ini menandakan bahwa aspek keadilan sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan keadilan dalam hal kesamaan proporsional, yang mana memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan lain sebagainya, Oleh karena, keuntungan yang didapat disesuaikan dengan nilai transaksinya.

- c) Pasal 8 PP No.33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi, dimana Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan.

Dari aspek kepastian memang sudah diatur bahwa pemodal memperoleh bagian keuntungan, hanya saja tidak diatur seberapa besar keuntungan yang bias didapat oleh pemodal. Sementara keuntungan yang diperoleh oleh pemodal tentu saja bermanfaat

bagi yang bersangkutan. Begitu juga halnya dari sisi keadilan, dimana pemodal mendapatkan hasil dari keikutsertaannya dalam menanamkan modal penyertaan dalam koperasi.

2. *Pengaturan mengenai Lapangan Usaha koperasi yaitu:*

Pengaturan mengenai Lapangan Usaha Koperasi ini, terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU No.25 tahun 1992. yakni:

- 1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- 2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- 3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Jika dianalisis dari aspek kepastian menurut Gustav Radbruch, maka jelas bahwa lapangan usaha koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota.

Sementara dari aspek kemanfaatan dapat ditemukan dalam tujuan pendirian koperasi. Dimana koperasi itu didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun pada kenyataannya, banyak koperasi yang menyalahgunakan pendirian koperasi, yang mana koperasi digunakan sebesar-besarnya untuk mencari keuntungan para para pengurus atau pengawas, bahkan koperasi berpraktik layaknya bank, yaitu menghimun dana masyarakat dengan produk deposito, tabungan dan kredit umum dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding bank umum seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nuansa Pelangi Indonesia (NPI) Banjarnegara (<http://medianapooh.blogspot.com/2010/10/kasus-koperasi.html>). Dimana dengan Macetnya dana masyarakat yang dihimpun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nuansa Pelangi Indonesia (NPI) Banjarnegara, mendapat perhatian Polres Banjarnegara. Untuk mengusut itu, Polres membentuk tim khusus. Dari penelitian ternyata tim menemukan 47.926 rekening milik nasabah. Rekening tersebut meliputi deposito investasi berjangka, tabungan menjelang hari raya (tamara) dan tabungan harian sigap. Dari hasil pemeriksaan terhadap Ketua Koperasi NPI, koperasi tersebut menghimpun dana masyarakat senilai Rp 20,469 miliar lebih. ribuan nasabah koperasi simpan pinjam NPI Banjarnegara resah akibat tak dapat menarik kembali uang milik mereka.

Sedangkan kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Selain itu juga, dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi diharapkan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial menurut bukunya Notohamidjojo sangat relevan dalam lapangan usaha koperasi ini. Oleh karena kegiatan usaha koperasi diharapkan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

3. *Pengaturan mengenai pertanggungjawaban ketika koperasi mengalami kerugian yaitu:*

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban ketika koperasi mengalami kerugian hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 7 PP No.33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Dimana

- 1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai (besarnya uang atau nilai barang modal yang ditanamkan) modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut.

Artinya dengan ketentuan ini, maka Pemodal yang turut serta dalam pengelolaan dan turut menyebabkan kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan bertanggung jawab tidak saja terbatas pada dana yang ditanamkannya sebagai modal penyertaan, tetapi dapat melebihi jumlah tersebut, sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan karena kesalahannya. Ketentuan ini juga berlaku meskipun Pemodal tidak turut secara langsung dalam pengelolaan, namun Pemodal yang bersangkutan dapat dibuktikan berperan dalam penentuan jalannya pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan menyebabkan kerugian tersebut.

Menurut penulis, beban yang dipikul oleh pemodal sangat tidak adil karena pemodal mesti bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi. Memang bisa saja pemodal turut bertanggungjawab terhadap kerugian koperasi sesuai dengan perjanjian diantara antara koperasi dengan pemodal, oleh karena Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal. (Pasal 4 PP No.33 tahun 1998). Akan tetapi jika koperasi mengalami kerugian akibat kesalahan pengurus atau pengelola maka itu menjadi sesuatu yang tidak adil. Pertanggungjawaban pengurus atau pengelola lewat koperasi tidak diatur secara pasti dalam Peraturan Pemerintah ini, sehingga aspek kepastian tidak ditemukan atau tidak terpenuhi dalam ketentuan PP No.33 tahun 1998 ini. Sehingga tentu saja, dengan ketentuan yang mengharuskan Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai (besarnya uang atau nilai barang modal yang ditanamkan) modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi tidak mendapatkan manfaat bagi pemodal.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan mengenai koperasi di atas, maka hendaknya aspek bekerjanya hukum (Robert B. Seidman, 1972) dalam hal ini pembuat Undang-Undang (eksekutif dalam hal ini Presiden dan Menteri Koperasi bersama-sama dengan legislatif), lembaga-lembaga pelaksana Lembaga Penegak Hukum yang tergabung dalam catur wangsa (Polisi, jaksa, hakim dan pengacara) serta pemegang peran itu diharapkan bertindak sesuai dengan cita-cita untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

D. KESIMPULAN

Dari analisa atau pembahasan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori Gustav Radbruch mengenai aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan tidak selamanya berjalan bersamaan atau tidak dapat dipenuhi sehingga seringkali terjadi pertentangan dari ketiga aspek tersebut. Sehingga diharapkan pengaturan mengenai koperasi ini segera diubah atau diganti demi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga pada akhirnya koperasi berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010.
Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Salatiga, 1975.
Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982.
Sri Harini Dwiyatmi, *Bahan kuliah Sosiologi Hukum Magister Ilmu Hukum UKSW*, Salatiga, 2010.
Tanya, Bernard L., Yoan & Markus, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang, 2006.

- Tanya, Bernard L, *Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UKSW*, Salatiga, 2010.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- <http://medianapoooh.blogspot.com/2010/10/kasus-koperasi.html>
- <http://nitakawaii.blogspot.com/2010/10/2contoh-kasus.html>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PP Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jo. Permen, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Perubahannya.